

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 7



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Koran Tempo	Wawasan
Tribun Jateng	Sindo	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita BPK Pusat

Halaman 2

Pansus Angket Tutup Rapat Hasil Audit KPK

Setelah Bertemu dengan BPK

JAKARTA - Satu per satu agenda yang ditetapkan Pansus Hak Angket KPK dilaksanakan. Kemarin (4/7) mereka datang ke kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk meminta hasil audit keuangan KPK. Namun, panitia khusus itu enggan membuka hasil laporan keuangan komisi antirasuah tersebut.

Rombongan pansus yang dipimpin Agun Gunandjar Sudarsa itu tiba di kantor BPK sekitar pukul 13.00. Mereka langsung naik ke lantai 19 dan menuju ruang tunggu. Beberapa saat kemudian, Ketua BPK Moermahadi Soerja Djane-gara datang menyambut para wakil rakyat itu. Para jurnalis yang datang

bersama rombongan pansus diminta menunggu di ruang rapat. "BPK yang minta tertutup," kata anggota Pansus Hak Angket KPK Mukhamad Misbakhun sebelum rapat dimulai.

Ada sekitar sembilan anggota pansus yang ikut dalam pertemuan itu. Selain Agun dan Misbakhun, hadir pula Wakil Ketua Pansus Angket Risa Mariska dan Dossy Iskandar Prasetyo, anggota pansus Masinton Pasaribu, Eddy Kusuma Wijaya, John Kenedy Azis, Muslim Ayub, serta Arteria Dahlan.

Menurut Agun, kedatangannya ke BPK untuk membangun semangat komitmen saling menghargai dan saling menghormati di antara sesama lembaga negara dalam melaksanakan tugas konstitusional. "BPK adalah lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional untuk melakukan

pemeriksaan dan pertanggung jawaban keuangan negara," terang dia.

Pertemuan berlangsung selama empat jam. Sekitar pukul 17.00 pansus dan BPK keluar menemui para wartawan. Dalam pertemuan tersebut, Pansus pihaknya meminta hasil audit, pemeriksaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban dana KPK. Mulai KPK berdiri hingga sekarang.

Dalam pertemuan dengan BPK, Agun mengungkapkan bahwa ada beberapa temuan. Di antaranya, persoalan terkait dengan SDM penyidik hingga beberapa ketidakpatuhan pengelolaan keuangan pada 2015-2016. "Tapi, kami belum bisa memberikan penjelasan terlalu jauh," ujar politikus Partai Golkar tersebut.

Agun mengungkapkan, meski komisi yang diketuai Agus Rahardjo itu

mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP), bukan berarti pengelolaan keuangannya bebas dari kesalahan. Dalam audit, BPK juga memberikan catatan yang harus diperbaiki. WTP itu hanya opini yang belum tentu klar.

Saat ditanya tentang jumlah laporan dan penyimpangan apa saja yang dilakukan KPK, Agun enggan menjawab. Dia menutup rapat data tersebut. "Kami belum bisa membuka karena datanya masih harus didalami," tuturnya. Setelah ini, pansus bertemu dengan berbagai kementerian untuk melakukan koordinasi.

Moermahadi menjelaskan, lembaganya sudah menyerahkan laporan yang diminta pansus. BPK menyerahkan laporan sejak 2006 hingga 2016. "Laporan itu sudah terbit lama," jelas dia. (lum/c14/fat)